



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah berstruktur pada suatu periode.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi anggaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

2. Tujuan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950, Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang



- Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119));
 8. PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang



- Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 17. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
 18. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;
 20. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 21. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4);
 24. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang



- Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2)
26. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 11)
 28. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo;
 29. Perbup Wonosobo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 30. Perbup Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 31. Perbup Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
 32. Perbup Wonosobo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 33. Perbup Wonosobo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Sistematika Penulisan.

Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab. III Penjelasan pos – pos laporan keuangan

- 3.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1. Belanja LRA
- 3.2. Neraca
 - 3.2.1. Aset
 - 3.2.2. Kewajiban
 - 3.2.3. Ekuitas
- 3.3. Laporan Operasional (LO)
 - 3.3.1. Pendapatan LO
 - 3.3.2. Beban LO
 - 3.3.3. Surplus/(Defisit) dari Operasi



- 3.3.4. Kegiatan Non Operasional
- 3.3.5. Surplus/(Defisit)-LO
- 3.4. Laporan Perubahan Ekuitasa (LPE)
- Bab. IV Penjelasan atau informasi-informasi non keuangan**
- Bab. V Penutup**



BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.350.635.026,00 dapat direalisasi Rp. 6.630.244.073,00 atau 87,83 % terdiri dari Belanja Operasional direncanakan sebesar Rp. 6.456.699.372,00 dapat direalisasi sebesar Rp. 5.761.148.073,00 atau 89,22 %. Dan Belanja Modal di rencanakan Rp. 893.935.654,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 869.096.000,00 atau 97,22 %. Dan Rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp. 300.000.000,00 dapat direalisasi Rp. 520.970.000,00.

Menurut Kelompok Belanja	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG	%
PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	520.970.000,00	220.970.000,00	74,00%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000.000,00	520.970.000,00	220.970.000,00	74,00%
Retribusi Daerah		800.000,00	800.000,00	
Lain-lain PAD yang Sah	300.000.000,00	520.160.000,00	220.160.000,00	73,00%
BELANJA DAERAH	7.350.635.026,00	6.630.244.073,00	(720.390.953,00)	90,19%
BELANJA OPERASI	6.456.699.372,00	5.761.148.073,00	(695.551.299,00)	89,22%
Belanja Pegawai	2.989.830.272,00	2.497.006.963,00	(492.823.309,00)	83,51%
Belanja Gaji Pokok ASN	1.292.043.375,00	107.915.7860,00	(212.885.515,00)	83,52%
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	159.348.694,00	116.222.180,00	(43.126.514,00)	72,93%
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	137.257.750,00	90.710.000,00	(46.547.750,00)	66,08%
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	60.408.250,00	32.940.000,00	(27.468.250,00)	54,52%
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.901.500,00	25.070.000,00	(3.831.500,00)	86,74%
Belanja Tunjangan Beras ASN	103.634.324,00	63.584.760,00	(40.049.564,00)	61,35%
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.000.000,00	7.452.611,00	(7.547.389,00)	49,68%
Belanja Pembulatan Gaji ASN	400.000,00	13.179,00	(386.821,00)	3,29%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	465.865.610,00	423.128.581,00	(42.737.029,00)	90,82%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	28.172.386,00	24.034.968,00	(4.137.418,00)	85,31%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	698.798.383,00	634.692.824,00	(64.105.559,00)	90,82%



Menurut Kelompok Belanja	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG	%
Belanja Barang dan Jasa	3.466.869.100,00	3.264.141.110,00	(202.727.990,00)	94,00 m mm %
Belanja Barang Pakai Habis	1.605.269.370,00	1.547.942.005,00	(57.327.365,00)	96,00%
Belanja Jasa Kantor	1.069.889.000,00	1.023.023.228,00	(46.865.772,00)	96,00%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.466.480,00	21.743.400,00	(13.723.080,00)	61,00%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00%
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	35.000.000,00	34.565.000,00	(435.000,00)	99,00%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.575.250,00	66.009.947,00	(25.565.303,00)	72,00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	611.169.000,00	552.357.530,00	(58.811.470,00)	90,0%
BELANJA MODAL	893.935.654,00	869.096.000,00	(24.839.654,00)	97,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	777.041.154,00	753.235.000,00	(23.806.154,00)	97,00%
Belanja Modal Komputer Unit	157.441.154,00	141.995.000,00	(15.446.154,00)	90,00%
Belanja Modal Peralatan Komputer	619.600.000,00	611.240.000,00	(8.360.000,00)	99,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.894.500,00	115.861.000,00	(1.033.500,00)	99,00%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	116.894.500,00	115.861.000,00	(1.033.500,00)	99,00%

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hambatan Pencapaian Target Pendapatan dan Belanja.

1. Hambatan dalam pencapaian target Pendapatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tidak dapat menentukan dengan target pendapatan karena pendapatan yang diperoleh tergantung pada banyak sedikitnya jumlah pengajuan dokumen kependudukan yang terlambat yang dikenakan denda sesuai dengan perda yang berlaku. Selain itu Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan denda akibat kelalaian masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

2. Hambatan dalam pencapaian target Belanja.

a. Dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tidak terlaksana secara maksimal karena Anggaran tersebut pada awalnya adalah untuk mendukung kegiatan DAK Non Fisik yang pada tahun ini sudah tidak ada.

b. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah masih terdapat sisa cukup besar karena merupakan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan PPPK yang pada tahun ini belum ada PPPK yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



- c. Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo masih kurang memadai untuk kegiatan pelayanan kependudukan kepada masyarakat karena banyak komputer yang rusak tapi tidak bisa diperbaiki. Sehingga berpengaruh terhadap realisasi Belanja sub keg Belanja Pemeliharaan Komputer yang tidak maksimal.



BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal Anggaran dan realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2022 serta realisasi TA 2021 sebagai berikut :

<i>Belanja Daerah</i>	TA 2022		TA 2021
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(i) Belanja Operasi	5.761.148.073,00	6.456.699.372,00	5.729.771.486,00
(ii) Belanja Modal	869.096.000,00	893.935.654,00	1.173.725.000,00
<i>Jumlah Belanja Daerah</i>	<u>6.630.244.073,00</u>	<u>7.350.635.026,00</u>	<u>6.903.496.486,00</u>

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 6.630.244.073,00 atau 90,19% dari Anggaran sebesar 7.350.635.026,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 273.252.413,00 atau 3,95% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp. 6.903.496.486,00.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dengan realisasi TA 2022 dan 2021 sebagai berikut :

<i>Belanja Operasi</i>	TA 2022		TA 2021
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(i) Belanja Pegawai	2.497.006.963,00	2.989.830.272,00	2.744.954.049,00
(ii) Belanja Barang dan Jasa	3.246.141.110,00	3.466.869.100,00	2.984.817.437,00
(iii) Belanja Bantuan Sosial			
<i>Jumlah Belanja Operasi</i>	<u>5.743.148.073,00</u>	<u>6.456.699.372,00</u>	<u>5.729.771.486,00</u>

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp. 5.743.148.073,00 atau 88,94% dari anggaran Rp. 6.456.699.372,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.376.587,00 atau 0,23 % dari realisasi TA 2021 Rp. 5.729.771.486,00



a. Belanja Pegawai

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.796.993.893,00	1.415.150.590,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.292.043.375,00	1.079.157.860,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.178.081.415,00	1.079.157.860,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	113.961.960,00	0
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	159.348.694,00	116.222.180,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	143.505.202,00	116.222.180,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.843.492,00	0
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	137.257.750,00	90.710.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	137.257.750,00	90.710.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	60.408.250,00	32.940.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	49.000.000,00	32.940.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	11.408.250,00	0
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.901.500,00	25.070.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.901.500,00	25.070.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	103.634.324,00	63.584.760,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	75.245.684,00	63.584.760,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	28.388.640,00	0
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.000.000,00	7.452.611,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.000.000,00	7.452.611,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	400.000,00	13.179,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	300.000,00	13.179,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	100.000,00	0
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.192.836.379,00	1.081.856.373,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	465.865.610,00	423.128.581,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	465.865.610,00	423.128.581,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	28.172.386,00	24.034.968,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	28.172.386,00	24.034.968,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	698.798.383,00	634.692.824,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	698.798.383,00	634.692.824,00
JUMLAH	2.989.830.272,00	2.497.006.963,00



b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang	1.605.269.370,00	1.547.942.005,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.605.269.370,00	1.547.942.005,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	38.645.750,00	37.553.040,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.550.000,00	1.100.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.080.000,00	1.574.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	113.005.025,00	106.438.325,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	131.631.600,00	130.480.140,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	165.546.760,00	164.336.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	1.530.000,00	1.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	839.600.000,00	807.550.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	30.344.000,00	28.903.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	2.051.600,00	2.050.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	555.000,00	555.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	555.000,00	555.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	123.374.155,00	120.576.700,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	24.500.000,00	24.255.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	14.835.480,00	14.685.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.020.000	106.385.000
Belanja Jasa	1.158.855.480,00	1.097.831.628,00
Belanja Jasa Kantor	1.069.889.000,00	1.023.023.228,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.500.000,00	19.900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	781.200.000,00	781.200.000,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	79.350.000,00	76.350.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	35.450.000,00	35.430.000,00
Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	625.552,00
Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	1.785.622,00
Belanja Tagihan Listrik	53.800.000,00	47.076.333,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.800.000,00	1.940.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	52.000.000,00	46.156.121,00
Belanja Paket/Pengiriman	4.800.000,00	484.100,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.789.000,00	12.075.500,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.466.480,00	21.743.400,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31.248.000,00	18.228.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.874.880,00	1.562.398,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.343.600,00	1.953.002,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	18.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	16.000.000,00	16.000.000,00



Belanja Barang dan Jasa	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.500.000,00	2.500.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	35.000.000,00	34.565.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kependudukan	35.000.000,00	34.565.000,00
Belanja Pemeliharaan	91.575.250,00	66.009.947,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.575.250,00	66.009.947,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.315.250,00	33.212.647,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.750.000,00	4.754.400,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.450.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	1.652.900,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	17.060.000,00	16.725.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	28.000.000,00	9.665.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	611.169.000,00	552.357.530,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	611.169.000,00	552.357.530,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	430.494.000,00	396.507.530,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.675.000,00	155.850.000,00
JUMLAH	2.764.124.850,00	2.645.773.633,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal meliputi Belanja Modal, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya dan Aset Lainnya dengan realisasi TA 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Belanja Modal	2022		2021
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)
a. Belanja Peralatan dan Mesin	753.235.000,00	777.041.154,00	946.201.752,00
b. Belanja Gedung dan Bangunan	115.861.000,00	116.864.500,00	59.220.000,00
Jumlah Belanja Modal	869.096.000,00	893.935.654,00	1.005.421.752,00

Ralisasi Belanja Modal pada pos belanja modal TA 2022 Sebesar Rp. 869.096.000,00 atau mencapai 97,22% dari anggaran Rp. 893.935.654,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami penurunan 13,55% atau sebesar Rp. 136.325.752,00.

a. Belanja Peralatan dan Mesin



Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebagai berikut :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Modal Komputer	777.041.154,00	753.235.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	157.441.154,00	141.995.000,00
Belanja Modal Personal Computer	157.441.154,00	141.995.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	619.600.000,00	611.240.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	564.100.000,00	556.990.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	55.500.000,00	54.250.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.894.500,00	115.861.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	116.894.500,00	115.861.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	116.894.500,00	115.861.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	116.894.500,00	115.861.000,00
JUMLAH	893.935.654,00	869.096.000,00

Ralisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp. 869.096.000,00 berupa :

No	Barang	Jumlah Barang	Harga Aset
1	Finger Print Biomorf	4	120.898.792
2	Irish Camera BMT20	4	75.622.112
3	PC HP ALL IN ONE HP proone600G6 all- in-one	4	88.621.552
4	Signature pad Signature gem T-lbk462	4	46.645.040
5	UPS PROLINK PRO1201SFCU	22	30.325.306
6	CAMERA DIGITAL CANON EOS 1500D + Adaptor JIP-ACK-E10	4	40.165.444
7	Printer Primacy SP00308	2	49.784.222
8	Monitor LG 20MK400H 21"	9	15.394.068
9	Printer EPSON Ecotank L1210	9	25.354.944
10	Monitor LG Ultrawide 34WP500 34"	1	5.523.755
11	Printer Primacy SP00308 Evolis	1	24.951.865
12	Printer EPSON Ecotank L3210	10	33.702.900
13	HP 22-df1004d	7	66.605.000
14	Samsung Galaxy Tab A8 LTE	2	8.990.000
15	HP Notebook 240	3	32.400.000
16	ASUS AIO E5401WRAT-	2	34.000.000



	BA585W		
17	Microphone TOA ZM380-AS	4	3.000.000
18	Router RUT955 LTE TELTONIKA	5	24.000.000
19	Router DL-7303 PROLINK	5	11.250.000
20	Encoder De-620L Duali	4	16.000.000
21	Penataan Lingkungan Kantor	5	115.861.000
JUMLAH			869.096.000,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebagai berikut :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung		
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	116.894.500,00	115.861.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	116.894.500,00	115.861.000,00
JUMLAH	116.894.500,00	115.861.000,00

Ralisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 Sebesar Rp. 115.861.000,00 atau mencapai 99,11% dari anggaran Rp 116.894.500,00 Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 97,33 % atau sebesar Rp. 57.644.500,00 Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2022 berupa Penyempurnaan Bangunan Gudang.

3.2. Neraca

3.2.1. Aset

Saldo Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.309.965.416,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.437.102.285,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. 127.136.869,00 atau 2,33% dan adapun aset yang masih masuk persediaan tetapi sudah tidak terpakai sebesar Rp. 36.586.000,00. dengan penjelasan masing-masing akun sebagai berikut:

Uraian	2022 (dalam Rupiah)	2021 (dalam Rupiah)	Bertambah/(Berkurang)	
			dalam Rupiah	%
ASET LANCAR	1.821.193.746,00	1.802.172.278,00	19.021.468,00	1,06
ASET TETAP	3.385.735.128,00	3.518.562.965,00	(132.827.837,00)	(3,78)
ASET LAINNYA	103.036.542,00	116.367.042,00	(13.330.500,00)	(11,46)
Jumlah	5.309.965.416,00	5.437.102.285,00	(127.136.896,00)	(2,33)



. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.821.193.746,00, jika dibandingkan dengan saldo TA 2021 sebesar Rp. 1.802.172.278,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.021.468,00 atau 1,06%. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Uraian	Aset Lancar TA 2022 dan TA 2021		Bertambah/(Berkurang)	
	TA 2022 (Rp.)	TA 2021 (Rp.)	(Rp.)	%
Persediaan	1.821.193.746	1.802.172.278	19.021.468	(1,06)
JUMLAH	1.821.193.746	1.802.172.278	19.021.468	(1,06)

Neraca Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 menunjukkan saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.821.193.746,00 dibanding saldo Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.802.172.278,00. Mengalami Peningkatan sebesar Rp. 19.021.468,00 atau sebesar 1,06% dengan penjelasan sebagai berikut:

		Dalam Rupiah
(1)	Saldo Per 31 Desember 2021	1.802.172.278,00
	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari	1.821.193.746,00
	Alat Tulis Kantor	82.660.000,00
	Bahan Cetak	858.477.080,00
(2)	Bahan Komputer	868.650.666,00
	Perabot Kantor	1.416.000,00
	Alat /Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	9.990.000,00
	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari	1.802.172.278,00
	Alat Tulis Kantor	406.160.000,00
(3)	Bahan Cetak	958.090.154,00
	Bahan Komputer	372.274.624,00
A4)	(1)+(2)-(3) Saldo Per 31 Desember 2022	1.821.193.746,00

s

2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 3.385.735.128,00 merupakan aset tetap yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan saldo akhir Tahun 2021 sebesar Rp. 3.518.562.965,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. 132.827.837,00 atau 3,78% dari Tahun 2021. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Aset Tetap TA 2022 dan TA 2021

Uraian	2022 (dalam Rupiah)	2021 (dalam Rupiah)	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Peralatan dan Mesin	9.456.675.070,00	8.703.440.070,00	753.235.000,00	8,65
Gedung dan Bangunan	2.275.088.833,00	2.159.227.833,00	115.861.000,00	5,36
JUMLAH	11.731.763.903,00	10.862.667.903,00	869.069.000,00	8,00

a. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.456.675.070,00 dan 2021 adalah sebesar Rp 8.703.440.070,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 753.235.000,00 atau 9% dari tahun 2021.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

		Dalam Rupiah
(1)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 8.703.440.070,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: 1.193.763.246,00 1.193.763.246,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: 440.528.246,00 440.528.246,00
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2022	9.456.675.070,00

Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Saldo TA 2021 (Dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2022 (Dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
Alat Bantu	178.860.000,00	-	-	-	-	178.860.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.911.803.885,00	-	-	-	-	1.911.803.885,00
Alat Kantor	533.543.436,00	-	-	-	-	533.543.436,00
Alat Rumah Tangga	657.749.167,00	3.000.000,00	-	-	-	660.749.167,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	126.473.300,00	-	-	-	-	126.473.300,00
Alat Studio	342.268.140,00	70.490.750,00	-	-	-	412.758.890,00
Alat Komunikasi	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00
Alat Kedokteran	3.800.000,00	-	-	-	-	3.800.000,00
Unit Alat Laboratorium	6.800.000,00	-	-	-	-	6.800.000,00
Komputer Unit	1.296.159.074,00	88.621.552,00	-	141.995.000,00	-	1.526.775.626,00
Peralatan Komputer	3.612.898.132,00	278.415.944,00	440.528.246,00	611.240.000,00	-	4.062.025.830,00
Alat SAR	31.084.936,00	-	-	-	-	31.084.936,00
Jumlah	8.703.440.070,00	440.528.246,00	440.528.246,00	753.235.000,00	-	9.456.675.070,00

Berdasarkan uraian table di atas Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 9.456.675.070,00 sedangkan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada per 31 Desember 2021 adalah Rp.



8.703.440.070,00 terdapat kenaikan antara saldo per 31 Desember 2021 dengan saldo per 31 Desember 2022 di karenakan adanya :

- 1) Mutasi Debet sebesar Rp. 753.235.000,00 yang berasal dari Belanja Modal TA 2022 yaitu berupa :
 - Belanja Modal Personal Komputer Rp. 141.995.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Rp. 556.990.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp. 54.250.000,00.
- 2) Koreksi Debet sebesar Rp. 440.528.246,00 yang berasal dari :
 - Reklas dari Peralatan Komputer lainnya sebesar Rp. 38.250.000,00
 - Alat Rumah Tangga Lainnya berupa microphone TOA 2M380 A5 sebesar Rp. 3.000.000,00
 - Reklas ke peralatan jaringan sebesar Rp. 35.250.000,00
 - Reklas dari Peralatan Personal Komputer ke Peralatan Komputer lainnya sebesar Rp. 243.165.944,00, lalu ke Peralatan Studio dan Film sebesar Rp. 70.490.750 dan ke Personal Komputer sebesar Rp. 88.621.552,00.
- 3) Koreksi Kredit sebesar Rp. 440.528.246,00 merupakan reklas antar akun alat kantor dan rumah tangga

b. Gedung dan Bangunan

Saldo Neraca Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah adanya Audited per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 2.275.088.833,00 dan Rp. 2.159.227.833,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 115.861.000,00 atau 5,36%. Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada berikut:

Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Saldo TA 2021 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2022 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
Bangunan Gedung Kantor	2.134.662.833,00	-	-	115.861.000,00	-	2.250.523.833,00
Bangunan Gedung Instalasi	24.565.000,00	-	-	-	-	24.565.000,00
Jumlah	2.159.227.833,00			115.861.000,00		2.275.088.833,00



Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	Dalam Rupiah 2.159.227.833,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari Belanja Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	:	115.861.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari Belanja Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	:	-
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2022		2.275.088.833,00

c. Akumulasi Penyusutan

Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Saldo Neraca Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2022 adalah sebesar (Rp. 8.346.028.775,00), Jika dibandingkan dengan saldo TA 2021 sebesar (Rp. 7.344.104.938,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp. 1.001.923.837,00) atau 14%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2022 dengan penjelasan dibawah ini.

Akumulasi Penyusutan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Saldo TA 2021 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2022 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.507.073.515,00)	-	958.296.228,00	-	-	(7.465.369.743,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(837.031.423,00)	-	43.627.609,00	-	-	(880.659.032,00)
Jumlah	(7.344.104.938,00)	-	1.001.923.837,00		-	(8.346.028.775,00)

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	Dalam Rupiah -7.344.104.938,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari Akumulasi Penyusutan	:	-
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari Beban Tahun 2022	:	1.001.923.837,00
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2022		-8.346.028.775



d. Aset Lainnya

Pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa saldo Aset Lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2022 adalah sebesar Rp. 103.036.542,00 sedangkan TA 2021 saldonya Rp. 116.367.042,00. Saldo Aset lainnya tersebut berasal dari Saldo Aset Lain-Lain dan Akumulasi Aset lain lain. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel . Aset Lainnya TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp.)	TA 2021 (Rp.)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
Aset Tidak Berwujud	250.070.826,00	250.070.826,00	-	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(147.034.284,00)	(133.703.784,00)	280.738.068,00	210
S JUMLAH	103.036.542,00	116.367.042,00	427.772.352,00	269

e

Aset Tidak Berwujud

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa saldo Aset Tidak Berwujud TA 2022 adalah sebesar Rp. 103.036.542,00 sedangkan pada TA 2021 memiliki saldo Rp. (147.034.284,00) hal tersebut dikarenakan pada TA 2022 tidak ada anggaran dan tidak belanja Aset Tidak berwujud

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud pada TA 2022 sebesar (Rp. 147.034.284,00,00) sedangkan pada TA 2021 memiliki saldo (Rp. 133.703.784,00).

3.2.2. Kewajiban

Saldo Kewajiban di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2022 adalah sebesar Rp 7.144.139,00 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2021 sebesar Rp 12.023.479,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.879.340,00 atau 40,58%. Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepenuhnya berasal dari kewajiban Jangka Pendek, dengan rincian sebagaimana Tabel dibawah ini:



Tabel Kewajiban TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp.)	TA 2021 (Rp.)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
U Kewajiban Jangka Pendek	7.144.139,00	12.023.479,00	4.879.340,00	40,58
U JUMLAH	7.144.139,00	12.023.479,00	4.879.340,00	40,58

utang Jangka Pendek per 31 Desember 2022 berupa utang beban barang dan jasa terdiri dari :

- Beban tagihan telepon sebesar Rp. 3.879.363,00;
- Beban tagihan air sebesar Rp. 176.755,00;
- Beban tagihan listrik sebesar Rp. 3.028.163,00;
- Beban tagihan kawat/faksimili/internet/TV kabel/TV sateliti sebesar Rp. 3.442.500,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	Dalam Rupiah 12.023.479,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari Pembayaran utang belanja tahun 2021	:	12.023.479,00 12.023.479,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari Utang belanja tahun 2022	:	7.144.139,00 7.144.139,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2022		7.144.139,00

3.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.302.821.277,00 dibandingkan dengan saldo ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.425.078.806,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 122.257.529,00 atau 2%.

3.3. Laporan Operasional (LO)

3.3.1. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan – Lo di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2022 sebesar 520.970.000,00 jika dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 543.805.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 22.835.000,00 atau 4,19%.



3.3.2. Beban-LO

Realisasi Beban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2022 adalah sebesar Rp. 7.057.774.079,00, Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 7.093.352.040,35 mengalami penurunan sebesar Rp. 35.577.961,35 atau (21,96%). Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel III.24 sebagai berikut:

Beban-LO

NO	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2022	2021	(Rp)	(%)
1	Beban Pegawai	2.496.500.488,00	2.744.954.049,00	(248.453.561,00)	(9,05)
2	Beban Persediaan	1.834.699.489,00	2.241.091.940,00	(406.392.451,00)	(18,13)
3	Beban Jasa	1.092.952.288,00	786.894.605,00	306.057.683,00	38,89
4	Beban Pemeliharaan	66.009.947,00	127.402.979,00	(61.393.032,00)	(48,18)
5	Beban Perjalanan Dinas	552.357.530,00	462.028.700,00	90.328.830,00	19,55
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.015.254.337,00	730.979.767,35	284.274.569,65	38,88
	Jumlah	7.057.774.079,00	7.093.352.040,35	(35.577.961,35)	21,96

1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021 setelah masing masing sebesar Rp. 2.496.500.488,00 dan Rp. 2.744.954.049,00, mengalami penurunan sebesar Rp.(248.453.561,00) atau (9,05%) dari TA 2021.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2022

Uraian Beban Pegawai	Jumlah
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.414.644.115,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.078.697.500,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	116.176.144,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	116.176.144,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	90.710.000,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	90.710.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.940.000,00



Uraian Beban Pegawai	Jumlah
Beban Tunjangan Fungsional PNS	32.940.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.070.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.070.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	63.584.760,00
Beban Tunjangan Beras PNS	63.584.760,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.452.611,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.452.611,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	13.100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.081.856.373,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	423.128.581,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	24.034.968,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	634.692.824,00
Jumlah Beban Pegawai	4.214.449.657,00

2. Beban Persediaan

Pada tabel dibawah ini menunjukkan Realisasi Beban Persediaan TA 2022 adalah sebesar Rp. 1.834.699.489,00 Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 2.241.091.940,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (406.392.451,00) atau (18,13%) .

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan atau diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2022

Uraian Beban Persediaan	Jumlah
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.553.040,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.100.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.574.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	429.938.325,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	158.810.112,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660.618.804,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.000.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	311.174.558,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	17.504.700,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.050.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	555.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera Mata	170.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	77.462.950,00



Beban Obat-Obatan-Obat	13.117.500,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	14.685.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	106.385.000,00
Jumlah Beban Persediaan	1.834.699.489,00

3. Beban Jasa

Beban Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp. 1.092.952.288,00 jika di bandingkan dengan Beban Jasa TA 2021 adalah Rp. 786.894.605,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 306.057.683,00 atau 38,89%.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 2022

Uraian Beban Jasa	Jumlah
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.900.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	781.200.000,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	76.350.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	35.430.000,00
Beban Tagihan Telepon	610.849,00
Beban Tagihan Air	1.802.212,00
Beban Tagihan Listrik	41.758.243,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.940.000,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	46.592.984,00
Beban Paket/Pengiriman	484.100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.075.500,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.228.000,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.562.398,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.953.002,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	16.000.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.500.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kependudukan	34.565.000,00
Jumlah Beban Jasa	1.092.952.288,00

4. Beban Pemeliharaan



Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 66.009.947,00 dan Rp. 127.402.979,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 61.393.032,00 atau sebesar (48,18)% dari tahun 2021. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022

Uraian Beban Pemeliharaan	Jumlah
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.212.647,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.754.400,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.652.900,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16.725.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	9.665.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	66.009.947,00

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 552.357.530,00 dan Rp. 462.028.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 90.328.830,00 atau sebesar 19,55 % dari tahun 2021.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022

Uraian Beban Perjalanan Dinas	Jumlah
Beban Perjalanan Dinas Biasa	396.507.530,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	155.850.000,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	552.357.530,00

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan tahun 2021 masing-masing sebesar Rp. 1.015.599.161,00 dan Rp. 730.979.767,35 mengalami kenaikan sebesar Rp. 284.619.394,65 atau sebesar 38,88% dari tahun 2021.



Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022.

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Jumlah
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	958.269.228,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.972.433,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	13.330.500,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.015.599.161,00

3.3.3. Surplus/(Defisit) dari Operasi

Realisasi Pendapatan-LO TA 2022 sebagaimana penjelasan diatas maka diperoleh defisit operasi sebesar (Rp. 6.095.893.773,00), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yaitu sebesar (Rp. 5.994.569.540,00) maka bisa dikatakan cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp. 101.324.233,00 atau 1,8%.

3.3.4. Kegiatan Non Operasional

Pada TA 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Rp. 0,00.

3.3.5. Surplus/(Defisit)-LO

Berdasarkan surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit luar biasa pada TA 2022 diatas maka diperoleh defisit-LO sebesar sebesar (Rp. 6.095.893.773,00), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yaitu sebesar (Rp. 5.994.569.540,35) maka bisa dikatakan cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp. 101.324.233,00 atau 1,8%.

3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas selama tahun 2022. Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.302.476.453,00 dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2021



sebesar Rp. 5.425.078.806,00, ditambah surplus/defisit LO TA 2022 sebesar (Rp. 6.095.893.773,00), ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 6.109.274.073,00.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal TA 2022 sebesar Rp. 5.425.078.806,00 berasal dari Saldo Ekuitas Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.733.905.432,00

2. Surplus/(Defisit) LO TA 2022

Berdasarkan Laporan Operasional TA 2022 menunjukkan bahwa defisit LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar (Rp. 6.095.893.773,00).

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berasal dari :

- Koreksi nilai persediaan (serah terima persediaan) Rp. 135.476.178,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya (506.475.000)

4. Kewajiban yang di konsolidasikan sebesar Rp. 6.109.274.073,00



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

A. Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu entitas akuntansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 8 Wonosobo Nomor Telepon (0286) 321412 Dalam mengelola keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh para Pejabat Pengelola Keuangan, dengan susunan sebagai berikut:

Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022

No	Pengelola Keuangan	Nama	NIP	JABATAN
1	Pengguna Anggaran	TARJO S.Sos, M.Si	196508071986071001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	PPK SKPD	TRI SULISTYWATI S.Sos, MM.	197011111997032004	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Bendahara Pengeluaran	SUMARNI	198303222014062002	Pengadministrasi Keuangan
4	Bendahara Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji	MUSLIKHATUN	198110172010012002	Pengadministrasi Umum
5	Pengurus Barang	JAMZANI	197007252008011007	Pengadministrasi Umum

Sementara itu dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberdayakan personil yang ada dengan data sebagai berikut.

Data Karyawan Tahun Anggaran 2022

NO	Golongan	Jumlah
1	ASN	19 orang
3	Non ASN	31 orang
	Jumlah	50 orang



BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan TA 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam TA 2022 serta realisasi TA sebelumnya, posisi kekayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penjelasan yang memadai sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2022.

Wonosobo, 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo ,

TARJO,S.Sos, M.Si

NIP. 191q650807 198607 1 001